



Dana Hibah KONI dan PMI Kembali Dipertanyakan

Amurang, KOMENTAR

Desakan agar Pemerintah Kabupaten (Pekab) Minahasa Selatan (Minsel) memangkas anggaran tidak penting untuk dialihkan bagi penanggulangan wabah Covid-19 kembali digemakan. Terutama dana-dana hibah dengan anggaran fantastis dan pada sisi lain belum dapat dipergunakan. Pada bagian lain dana hibah yang hanya menjadi ajang pencitraan politik juga sudah seharusnya ditarik.

Paling disorot yakni hibah kepada KONI Minsel senilai Rp 1 miliar. Dengan tidak adanya even olahraga, apalagi selama ini dikeluhkan tidak mengalir ke atlet dan pelatih didesak untuk dikembalikan. Dana hibah diharapkan dialihkan untuk belanja bantuan jaring sosial masyarakat. Apalagi Pekab Minsel hanya menganggarkan kurang lebih Rp 3 miliar, masih jauh dari kebutuhan masyarakat.

"Di tengah wabah virus yang juga memberi dampak pada kesulitan ekonomi, anggaran-anggaran tidak mendukung sudah seharusnya dihapus. Seperti dana hibah bagi KONI yang memang jelas tidak dapat dipergunakan sekarang ini. Kan tidak ada even olahraga dan setahu kami juga pembinaan bagi atlet tidak ada. Sudah seharusnya anggaran hibah dibelanjakan untuk kebutuhan bahan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat," sebut Hems Ruus dari kalangan tokoh masyarakat.

Lebih lanjut dia juga

menyorot hibah ke PMI Minsel yang juga dengan nilai Rp 1 miliar. Seharusnya anggaran dari negara disatukan, bukan justru dipecah dan dibagikan dengan organisasi lain untuk menangani wabah. Apalagi bila nantinya justru digunakan sebagai ajang popolaritas pribadi. Sehingga seharusnya ditarik dan dipergunakan sepenuhnya bagi rakyat.

"Sudah seharusnya seluruh anggaran milik pemerintah difokuskan pada penanggulangan wabah. Kita melihat di sejumlah wilayah seperti Boltim yang menganggarkan puluhan miliar. Serta memberikan jaminan hidup pada masyarakat selama beberapa bulan. Sehingga himbuan tinggal di rumah dapat lebih efektif. Karena itu dana hibah seperti untuk PMI ditarik untuk menambah 'amunisi' Pekab Minsel," terangnya.

Lanjut dia mengharapkan semoga saja Pekab Minsel benar-benar menempatkan masyarakat pada kepentingan tertinggi. "Jangan sampai masyarakat hanya menjadi subyek. Apalagi dari pemberitaan yang kami dapat, anggaran Rp 18 miliar dari Pekab tidak berpihak pada masyarakat. Untuk bantuan jaring sosial hanya dianggarkan Rp 3 miliar. Sangat tidak sebanding dengan yang lain. Padahal jaring sosial sangat penting agar warga dapat tinggal di rumah guna memutus mata rantai penyebaran covid-19," pungkask Ruus.^(*)